

STRATEGI PASTORAL GEREJA KEUSKUPAN RUTENG DALAM MENANGGAPI POLITIK PATRONASE: SEBUAH TINJAUAN BERDASARKAN TEOLOGI PUBLIK

Emanuel Rizan Pryatno

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
email korespondensi: ichanpryatno@gmail.com

Diterima tanggal: 28-06-2025

Dipublikasikan tanggal: 28-06-2025

Abstract. *This research examines the pastoral strategy of the Diocese of Ruteng Church in responding to the rise of patronage politics in the Manggarai region post-reformation. Using a public theology approach, the objective of this research is to analyze how the Church voices ethical and faith-based values amidst a corrupt local political context. Through a qualitative literature review method that examines official Church documents such as pastoral letters and synod documents, it was found that the Church's involvement has thus far been more educational-moral in nature. This strategy is realized through practical efforts such as public animation to cultivate a culture of shame and honesty, the radicalization of ethical attitudes through education and anti-money politics campaigns, and urging democratic institutions to operate fairly. Although this effort is an important public contribution, the research concludes that this approach has not yet effectively addressed the structural roots of patronage politics. Therefore, it is recommended that the Church deepens its involvement by integrating its moral and spiritual approach with more focused structural advocacy and cross-sectoral collaboration to realize a more holistic social change and a dignified democracy.*

Keywords: *Public Theology, Catholic Church, Patronage Politics, Pastoral, Diocese Of Ruteng*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji strategi pastoral Gereja Keuskupan Ruteng dalam menanggapi maraknya politik patronase di wilayah Manggarai pasca-reformasi. Dengan menggunakan pendekatan teologi publik, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana gereja menyuarakan nilai-nilai etis dan iman di tengah konteks politik lokal yang koruptif. Melalui metode kualitatif studi kepustakaan yang menelaah dokumen resmi gereja seperti surat gembala dan dokumen sinode, ditemukan bahwa keterlibatan gereja selama ini lebih bersifat edukatif-moral. Strategi ini diwujudkan melalui upaya praksis seperti animasi publik untuk menumbuhkan budaya malu dan kejujuran, radikalisasi sikap etis lewat edukasi dan kampanye anti-politik uang, serta desakan pada institusi demokrasi untuk bekerja secara adil. Meskipun upaya ini merupakan kontribusi publik yang penting, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan tersebut belum secara efektif menyentuh akar struktural politik patronase. Oleh karena itu, direkomendasikan agar gereja memperdalam keterlibatannya dengan memadukan pendekatan moral dan spiritualnya dengan strategi advokasi struktural yang lebih terarah serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan perubahan sosial yang lebih utuh dan demokrasi yang bermartabat.

Kata kunci: Teologi Publik, Gereja Katolik, Politik Patronase, Pastoral, Keuskupan Ruteng

PENDAHULUAN

Pasca-reformasi, sistem desentralisasi di Indonesia diharapkan membawa angin segar bagi demokrasi (Schultenordholt and Klinken 2007). Namun, *de facto* sistem ini justru membuka ruang bagi suburnya praktik politik patronase. Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, eskalasi politik patronase di Indonesia dapat disimak dengan meningkatnya praktik politik uang. Dalam praktik ini, para kandidat mendistribusikan materi kepada para pemilih. Mereka membagikan bantuan seperti uang tunai, kerudung, kalender, alat olahraga, kaus, sembako, janji *door price*, pengobatan gratis, ataupun dana insentif (Aspinall and Sukmajati 2015).

Sadar akan praktik politik patronase di Indonesia, beberapa studi telah menawarkan solusi. Dalam artikel berjudul “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia”, Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedi Hermawan menegaskan persoalan politik patronase (politik uang) di Indonesia dapat diatasi dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Melalui pendekatan ini, para pemilih diberi pemahaman dari segi afektif dan kognitif tentang bahaya dan dampak politik patronase (politik uang) (R. C. Kurniawan and Hermawan 2019).

Sementara itu, dalam artikelnya berjudul “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa”, Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobbi menegaskan persoalan politik uang dapat diatasi melalui pendidikan politik di tingkat desa. Menurut mereka, pendidikan politik dibuat dengan upaya: a) preemtif, yakni terkait rencana dan pengambilan keputusan yang ditandai dengan deklarasi Desa Anti-Politik Uang, b) preventif, yakni upaya pencegahan yang dilakukan Tim Desa Anti-Politik Uang dengan membuka posko

pengaduan bagi masyarakat yang menyaksikan atau melaksanakan transaksi politik uang dalam pesta demokrasi (Pahlevi and Amrurrobbi 2019).

Menurut penulis, studi di atas cenderung *top-down* dan mengandalkan intervensi pemerintah. Berbeda dari studi di atas, tulisan ini menawarkan pendekatan berbeda, yakni dengan melihat kontribusi institusi keagamaan, khususnya Gereja Katolik Keuskupan Ruteng, Manggarai, Flores, NTT, dalam menanggapi praktik patronase. Secara khusus, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji kontribusi Gereja Keuskupan Ruteng secara menyeluruh dan abstrak. Fokus kajian ini diarahkan pada strategi pastoral edukatif gereja dalam menanggapi politik patronase, terutama melalui pendekatan teologi publik. Kajian ini akan menyoroti dimensi pendidikan politik umat, penggunaan narasi profetik dalam surat gembala dan kotbah, serta refleksi teologis atas keterlibatan iman di ruang publik. Dengan demikian, pendekatan ini bersifat tematis dan normatif-reflektif, bukan studi dampak atau evaluasi kebijakan pastoral secara kuantitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pilihan metode ini dipertimbangkan secara sadar karena tujuan tulisan ini bukanlah untuk mengevaluasi secara empiris dampak atau efektivitas program pastoral gereja, melainkan untuk menganalisis dan merefleksikan strategi pastoral Gereja Keuskupan Ruteng dalam terang teologi publik. Data yang digunakan berasal dari dokumen-dokumen resmi gereja seperti surat gembala, dokumen sinode, serta literatur ilmiah dan refleksi teologis yang relevan (Nastution 2023).

Selain itu, metode ini dipilih dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik yang sensitif di wilayah Manggarai, serta keterbatasan akses langsung terhadap data lapangan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman kritis terhadap narasi iman gereja dalam berinteraksi dengan politik patronase melalui perspektif teologi publik.

HASIL PENELITIAN

Politik Patronase dan Strategi Pastoral Gereja Keuskupan Ruteng

Politik patronase merujuk pada praktik distribusi sumber daya material oleh politisi kepada individu atau kelompok dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Bentuknya bisa berupa uang tunai, barang, bantuan sosial, bahkan proyek pembangunan fasilitas umum (Aspinall and Sukmajati 2015). Dengan itu, patronase sebetulnya merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan politisi kepada pemilih atau pendukung. Dana yang didistribusikan kepada pemilih berasal dari dana pribadi dan dari pelbagai sumber lainnya (Ahimsa-Putra 2017).

Seperti halnya di daerah lain, demikian politik patronase juga melanda wilayah Manggarai, Flores, NTT. Pada tahun 2019, misalnya, di Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyeret nama dan calon legislatif Partai Amanat Nasional kepada pihak kepolisian. Dengan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 300.000, kartu nama, dan stiker caleg, pihak Bawaslu menduga calon tersebut melakukan praktik politik uang (Manasye 2019).

Sementara itu, di Manggarai Timur, salah seorang ASN diduga kuat terlibat mendukung salah seorang calon legislatif dari Kecamatan Kota Koba. Disinyalir ia membagikan sejumlah uang dan fotokopi contoh suara salah satu calon kepada para pemilih. Aksi tersebut dibuat untuk memperoleh dukungan demi kemenangan calon legislatif bersangkutan (Kurniawan, 2019). Selain itu terkini, menurut pengakuan Bawaslu Manggarai Timur, dari 596 TPS, beberapa lokasi pemilihan amat rentan melakukan kecurangan. Selain dalam bentuk intimidasi politik, kecurangan tersebut bisa dalam bentuk jual beli suara (Ardin 2024).

Di tengah persoalan politik patronase, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng mengupayakan konsolidasi demokrasi. Dalam spirit teologi publik, gereja mencanangkan pendidikan politik sebagai langkah penguatan demokrasi. Pendidikan politik merupakan upaya edukatif dengan membentuk individu yang berkepribadian politik agar dapat menunjang konsolidasi kesadaran demokratis dalam tatanan sosial. Pendidikan politik dibuat dengan tujuan agar masyarakat bertindak cermat dan tepat, memiliki kemampuan reflektif mumpuni, dan dapat berkeadilan pada prinsip kejujuran dan kebenaran dalam berdemokrasi (Handoyo and Lestari 2017).

Karena itu, demi menunjang konstruksi pendidikan politik, Keuskupan Ruteng berpedoman pada beberapa basis nilai. *Pertama*, secara institusional, gereja berkomitmen untuk mempraktikkan dan menghayati prinsip dan nilai etis sosial dalam persekutuan dirinya. Dengan menghidupi semangat ini, gereja menghidupi corak pastoral martiria. Dengan pastoral seperti ini, gereja berani menjadi saksi tentang kebenaran. gereja mampuewartakan dan menawarkan kebenaran dan

prinsip etis demokratis untuk dijadikan sebagai pegangan bersama dalam kehidupan publik.

Kedua, gereja mengupayakan pencerahan dalam masyarakat (Panita Sinode III Keuskupan Ruteng 2017). Dalam proses ini, Gereja Keuskupan Ruteng mendiseminasi pengetahuan dan prinsip-prinsip etis dalam hidup berdemokrasi. gereja berupaya mengonstruksi pemahaman agar masyarakat dapat hidup dalam basis kebenaran demokratis. Lantas, mengapa gereja perlu mengupayakan hal demikian? Hal ini karena gereja berharap agar masyarakat dapat memiliki kesadaran kritis dalam hidup berdemokrasi.

Sebagaimana Paulo Freire, kesadaran kritis merupakan kesanggupan setiap orang untuk memahami sebab-sebab ketertindasan dan memiliki kesanggupan untuk melakukan perubahan (McLaren 2018). Karena itu, dalam konteks terkini, upaya pencerahan dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran kritis terhadap hegemoni politik patronase dalam demokrasi. Kesadaran kritis memungkinkan masyarakat memiliki pemahaman mengapa persoalan politik patronase muncul dan mengapa ia mesti ditolak. Dengan itu, masyarakat dapat menimbang, mencermati, dan mengupayakan langkah perubahan dalam hidup berdemokrasi.

Untuk menunjang realisasi pendidikan politik dan konsolidasi kesadaran demokratis, Gereja Keuskupan Ruteng memproposalkan beberapa upaya praksis yang mencakup animasi publik, radikalisasi sikap etis, dan desakan institusi demokratis (Panita Sinode III Keuskupan Ruteng 2017). Pertama, animasi publik. gereja menganimasi klerus dan umat guna menghidupi budaya kejujuran, keterbukaan, dan kerja keras. Langkah ini ditempuh dengan menghidupi sistem

pengelolaan karya pastoral dan keuangan gereja secara akuntabel dan transparan. Dalam langkah animatif seperti ini, gereja juga mensosialisasi dan mengkampanyekan budaya malu dalam lingkup keluarga ataupun bermasyarakat. Kultur rasa malu dirawat agar memungkinkan orang tidak jatuh dalam godaan politik uang. Dengan memelihara rasa malu, orang akan menghindari kecenderungan skandal etis. Ia akan menata dirinya agar senantiasa berkiblat pada kebenaran dan kejujuran.

Kedua, radikalisasi sikap etis. Gereja Keuskupan Ruteng mengupayakan agar masyarakat menghidupi kebenaran dan kejujuran dalam kehidupan kolektif. Langkah ini dibuat melalui pembinaan iman dan edukasi publik. Pembinaan iman dilakukan dalam bentuk Perayaan Ekaristi dan Sharing bersama para politisi (kandidat). Dalam kegiatan seperti ini, para klerus menyampaikan seruan dan ajak agar setiap orang perlu menghindari dari politik uang. Para klerus mendorong agar setiap orang perlu merawat prinsip-prinsip etis sebagai panduan bersama dalam kehidupan kolektif.

Hal ini, misalnya, secara konkret diungkapkan Uskup Ruteng dalam Perayaan Ekaristi Perutusan Calon Bupati Manggarai pada 27 November 2024. Dalam perayaan tersebut. Mgr. Siprianus Hormat mengajak paslon untuk menciptakan Pemilukada yang damai dan bermartabat. Ia juga mendorong proses demokrasi yang berkiblat pada kedaulatan warga, menghargai martabat pribadi setiap pemilih dan menghindari praktik-praktik yang mencemari kebebasan dan keluhuran pilihan politik setiap warga (Fuka 2024).

Sementara itu, langkah edukasi publik dibuat melalui pengajaran di lingkup pendidikan ataupun seruan di media sosial. Dalam edukasi publik, gereja menghendaki agar setiap orang mengedepankan cara berpolitik yang bijak. Menjelang momen pilpres, pileg, pilkada, ataupun pilkades, gereja menyerukan ajakan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Sebagai desakan bersama, gereja mengkampanyakan agar menolak politik uang dengan slogan ‘*say no to money politic*’ dalam setiap pesta demokrasi. Hal ini tercermin dalam deklarasi damai yang diselenggarakan di Labuan Bajo pada 5 November 2020. Deklarasi yang diinisiasi Gereja Keuskupan Ruteng ini melibatkan paslon, KPU, Bawaslu, Polisi, dan TNI. Dalam deklarasi tersebut, para paslon membaca komitmen bersama agar pesta demokrasi dapat dijalankan secara jujur, bersih, adil, dan damai. Mereka berkomitmen agar Pilkada tersebut dapat dijauhkan dari pelbagai malpraktik politik dalam demokrasi (Suhardi 2020).

Ketiga, desakan institusi demokratis. gereja mendesak lembaga penting demokrasi untuk menghidupi budaya kejujuran dalam berdemokrasi. Hal ini tercermin dalam Surat Gembala Uskup Ruteng Menyongsong Pemilu 2024. Dalam surat tersebut gereja mendesak KPU, Bawaslu, dan Polisi agar menyelenggarakan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Gereja juga mendorong pemerintah agar menghidupi prinsip-prinsip etis dalam sistem berdemokrasi. Dengan menghidupi prinsip ini, pemerintah diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kesejatan demokrasi. Pemerintah dan setiap komponen penting dalam sistem politik adalah penjaga gawang demokrasi. Karena itu, gereja menghendaki setiap

komponen ini dapat bekerja dengan tulus dan senantiasa setiap mengabdikan kepada kebenaran konstitusi dalam demokrasi (Hormat 2024a).

Diskursus Teologi Publik

Menurut David Bromell, teologi publik adalah sejenis teologi yang tidak sebatas menjaga dan berbicara tentang iman dalam ruang publik, namun, ia juga berkecimpung dengan persoalan-persoalan bersama (Bromell 2011). Selain itu, David Tracy, sebagaimana Ted Peters, mengartikan teologi publik sebagai bentuk berteologi yang tidak semata-mata berfokus pada pembicaraan tentang Allah dalam ruang tertutup, namun ia amat berpaut dengan upaya menghubungkan refleksi tentang Allah dalam urusan bersama (Peters 2018). Karena itu, dapat dimaklumkan bahwa teologi publik merupakan sebuah diskursus teologis praktis yang berbicara tentang kontribusi iman Kristiani. Kontribusi ini berhubungan dengan relevansi klaim kebenaran Kristiani untuk meninjau dan merefleksikan isu ataupun persoalan konkret dalam tatanan sosial.

Lantas mengapa perlu berteologi secara publik? *Pertama*, karena Allah adalah ‘pengada’ yang bersifat publik (Juhani 2021). Allah adalah pencipta seluruh bumi dan segala isinya. Ia tidak menciptakan segala sesuatu hanya untuk golongan tertentu saja. Ia justru menyediakan semua hal yang ada di dunia ini untuk semua pihak. Ia menerbitkan matahari bagi semua insan. Ia menyediakan hujan bagi semua ciptaan (bdk. Matius 5:45). Singkatnya, ia menyelenggarakan dan mengadakan semua hal di bumi ini, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, untuk memenuhi kebutuhan siapa pun (Kejadian 1-2). Karena kebenaran karya penciptaan

ini bersifat publik, demi kepentingan universal, maka teologi publik menyadari bahwa gereja juga perlu berpartisipasi. gereja mesti terlibat untuk mengartikulasikan kebenaran Allah dengan terlibat secara konkret untuk menjadi ko-kreator Tuhan. Gereja mesti menjadi agen perpanjang-tangan kasih Allah dengan memastikan agar dunia tidak dikuasai hanya segelintir orang.

Kedua, karena corak tindakan Allah yang bersifat publik. Dalam kisah Khotbah di Bukit (Matius 5:1-2), misalnya, Yesus tidak berbicara secara monologal. Justru Ia menyampaikan kebenaran secara universal kepada manusia dari segala zaman (Riyanto 2021). Ia tidak berbicara untuk diriNya. Ia justru menekankan pemberitaan kabar baik kepada seluruh dunia (Bdk. Matius 24:14). Karena itu, seperti halnya corak misi Yesus, demikian teologi publik selalu menekankan keterbukaan gereja. Teologi publik selalu mengendaki gereja agar beranjak keluar dari ‘lintas batas’. Gereja tidak boleh tertutup. Malahan ia harus terbuka untuk membawa cara pandang Kristiani dalam menyikapi urusan bersama.

Ketiga, karena ruang publik bersifat sakramental. Menurut Stevan van Erp, dunia mengandung muatan sakramental sebab ia adalah tanda kehadiran Allah. Secara historis, menurut Erp, Allah telah menunjukkan tanda itu dalam dunia melalui Inkarnasi. Dalam proses ini, Allah menjelma menjadi manusia, dengan lahir, wafat, dan bangkit dalam dunia konkret (Erp 2024). Karena itu, bagi Erp, dalam teologi publik, gereja juga mesti terlibat untuk menunjukkan tanda kehadiran Allah dalam kehidupan bersama. Oleh karena Allah telah menunjukkan kehadirannya dalam proses sejarah, tiap-tiap orang-orang Kristiani dipanggil untuk

terlibat dalam ruang bersama. Tiap-tiap orang mesti bertindak untuk menyingkapkan dunia dan kehidupan yang sejati (Erp 2024).

Sejauh ini, teologi publik memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, teologi publik hendak menguraikan peran gereja dalam urusan bersama. Sebagaimana Paul S. Chung, hal ini mengarah kepada upaya gereja untuk melakukan pendekatan antropologi-kultural dengan bergelut dalam situasi konkret di luar gereja. Dengan orientasi semacam ini, gereja berusaha untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap konteks sosial, budaya, ataupun moral setempat. Demi menjamin suatu pergumulan teologis, pelbagai problem dalam dunia bersama juga refleksikan dari sudut pandang iman: “kira-kira apa yang hendak dikemukakan dalam narasi iman Kristen terkait suatu persoalan ataupun kejadian tertentu”(Chung 2010). Karena itu, dalam orientasi semacam ini, gereja menunjukkan sisi praksis dengan berkiabat pada narasi kehidupan. Narasi kehidupan itu digulati secara serius, disimak dalam terang iman, dan ditanggapinya dengan tindakan secara bersama. (Chandra 2021).

Kedua, menghubungkan karakter publik dalam dialog interdisipliner dengan ilmu-ilmu lain. Menurut Stachhouse, sebagai Paul S. Chung, Kitab Suci, Tradisi, ataupun pelbagai pengalaman iman tetap menjadi pemandu dalam refleksi teologis. Namun, dalam rumusan teologi publik, refleksi semacam itu perlu berinteraksi dan berdialogi dengan ilmu-ilmu sosial (humaniora). Hal ini perlu dibuat: a), untuk menjamin agar struktur dan logika iman bisa tersampaikan secara eksplisit, b), untuk menjamin argumentasi yang dapat dipahami dan diterima baik semua orang secara rasional, c), untuk melihat bahwa dalam teologi publik, posisi teologis tidak

terjerembab dalam logika internal Iman Kristen, namun juga pada suatu argumen yang dapat dimengerti secara umum (Chung 2010).

Ketiga, mengatasi keterlukaan dan mempromosikan kebaikan bersama. Menurut Paul S. Chung, teologi publik mesti berkuat pada agenda konkret bersama yang melampaui batas urusan ranah agama dan sekuler (Chung 2010). Gereja harus turut mempromosikan kebaikan umum. Dalam keterlibatannya, gereja hendak menawarkan wawasan-wawasan yang khas dan konstruktif demi mengupayakan pembebasan di tengah situasi keterlukaan.

PEMBAHASAN

Gereja Keuskupan Ruteng dan Kiblat Pada Kebaikan Komunal

Gereja Keuskupan Ruteng menyadari salah satu problem demokrasi saat ini ialah membuncahnya praktik politik patronase. Gereja memaklumkan bahwa menjelang pesta demokrasi, para kandidat kerap kali melakukan strategi malpraktik politik. Mereka menghalalkan segala cara termasuk dengan menggadaikan suara elektoral dengan uang atau materi tertentu (Hormat 2024b). Keprihatinan Gereja Keuskupan Ruteng tentu beralasan, sebab dalam aneka kejadian terbukti bahwa di wilayah Manggarai rentan terjadi persoalan politik patronase (politik uang).

Berhadapan dengan situasi ini, Gereja Keuskupan Ruteng tentu menunjukkan upaya solutif melalui strategi pendidikan politik. Dari perspektif teologi publik, gereja menunjukan upaya demikian, sebab disadari bahwa politik patronase (politik uang) mencederai kebaikan bersama. Politik patronase adalah praktik politik yang mendistorsi nilai luhur demokrasi. Politik patronase adalah

bentuk politik yang semata-mata berorientasi pada perebutan kekuasaan tanpa memperhatikan nilai-nilai etis dan partisipasi rakyat. Hal ini beralasan, mengingat dalam politik ini, para kandidat hanya sekadar mengejar dan mementingkan kehendak, tanpa mengakomodasi kepenuhi proses politik yang sejati (Panita Sinode III Keuskupan Ruteng 2017).

Hal ini pun secara tegas dikemukakan Mgr. Siprianus Hormat, Uskup Ruteng. Ia menegaskan praktik koruptif seperti ini jelas ditolak, sebab Bapa Suci Paus Fransiskus telah menegaskan pelbagai praktik politik koruptif, termasuk politik patronase, adalah bentuk perilaku iblis. Praktik seperti ini adalah wabah sosial, sebab orang kerap mencari keuntungan pribadi dengan kedok melayani masyarakat (Hormat 2024b).

Karena itu, gereja menunjukkan sikap penolakan dengan alasan bahwa politik patronase mencerminkan corak politik yang busuk. Itu adalah model politik yang koruptif. Politik tersebut merupakan gambaran konkret penyalagunaan kekuasaan yang lalim. Ia mencederai kebaikan publik (Komisi Keadilan dan Perdamaian 2009). Gereja menyadari bahwa politik busuk ini sesungguhnya terjadi karena beberapa faktor.

Pertama, hasrat kekuasaan. Gereja Keuskupan Ruteng menegaskan politik patronase terjadi karena suburnya ketamakan dan keserakahan para pemimpin. Tatkala ketamakan bertumbuh, seorang tidak akan berpuas diri. Justru dalam ketamakan, seorang akan mencari dan melebarkan sayap kekuasaan demi memenuhi kehendak dan keinginannya (Russel, 1988:1).

Kedua, tumpulnya hati nurani. Gereja Keuskupan Ruteng menilai para elite politik melakukan politik patronase lantaran enggan berpijak pada hati nurani. Tatkala sumber instansi moral ini diabaikan, orang kerap mengabaikan semangat berkompetisi yang sehat. Tanpa memikirkan konsekuensi etis, orang akan berperilaku instan dengan meraup keuntungan politis melalui praktik jual beli suara (Panita Sinode III Keuskupan Ruteng 2017).

Ketiga, lemahnya pendidikan dan kesadaran politik masyarakat. Gereja Keuskupan Ruteng menilai tatkala tidak memiliki pemahaman dan kesadaran politik yang cukup, masyarakat akan cenderung tergoda untuk terlibat dalam politik patronase. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat akan bertindak primitif. Mereka menerima dan menganggap transaksi jual-beli suara adalah sesuatu yang lumrah. Selain itu, tatkala pendidikan dan kesadaran politik minim, dengan sendirinya kritisisme masyarakat juga menurun. Tatkala daya kritis tumpul, masyarakat enggan memikirkan konsekuensi sosio-etis tatkala terlibat dalam politik patronase. Mereka tidak lagi berpikir untuk memilih calon pemimpin yang cakap dan rasional. Mereka tidak lagi menjatuhkan pilihan politik pada calon pemimpin yang memiliki program politik berkualitas guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera (*bonum commune*). Justru, tatkala uang dan materi menguasai mereka, masyarakat akan menunjukkan loyalitas semu dengan memilih calon bersangkutan (Panita Sinode III Keuskupan Ruteng 2017).

Keempat, kuatnya primordialisme. Masyarakat Manggarai memiliki sistem kekerabatan yang kuat. Dalam sistem ini, masyarakat cenderung menjatuhkan pilihan pada calon pemimpin yang telah menyampaikan janji tertentu. Tatkala

terpilih, pemimpin bersangkutan akan memberikan hadiah kepada pemilih bersangkutan. Biasanya, hadiah tersebut berupa jabatan penting dalam instansi pemerintahan. Pada gilirannya, sistem seperti ini memungkinkan politik balas budi (Panita Sinode III Keuskupan Ruteng 2017).

Gerakan Pembebasan Melalui Pendidikan Politik

Upaya pendidikan politik yang dicanangkan sesungguhnya menunjukkan spirit pembebasan dalam ruang publik. Pembebasan ini dipahami sebagai upaya penyelamatan terhadap seluruh realitas yang mengitari manusia untuk diarahkan dan diubah menuju kepenuhan Kristus (Gutiérrez 1983). Pembebasan ini bertujuan agar dunia dapat diselamatkan dan hidup dalam keadaan yang baru.

Pembebasan atau penyelamatan melalui pendidikan politik ini didasarkan pada beberapa hal. *Pertama*, pewahyuan Allah dalam penciptaan. Kisah penciptaan dimaknai sebagai bagian dari proses penyelamatan. Dalam karya penciptaan dikemukakan bahwa Allah menyediakan banyak keistimewaan bagi manusia. Walaupun jatuh dalam dosa, Allah senantiasa memanggil manusia untuk menjadi insan yang hidup dalam kebaikan dan kebenaranNya. Penciptaan menegaskan langkah awal penyelamatan, bahwa Tuhan yang transenden menunjukkan karya pewahyuan untuk memulihkan dan menyelamatkan dunia (Gutiérrez 1988).

Kedua, peristiwa Eksodus sebagai wujud pembebasan sosio-historis. Karya penyelamatan Allah juga dinyatakan dalam peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dalam peristiwa ini, Allah turut bekerja menyelamatkan

orang-orang Israel dari realitas ketertindasan dan menghantarkan mereka pada tanah terjanji sebagai tanda kehidupan yang baru. Dalam peristiwa tersebut, Allah bertindak sedemikian rupa, sehingga harapan dan janji Allah atas bangsa tersebut terpenuhi dengan mantap. Inilah dimensi religius-mistik peristiwa Eksodus, tatkala ia menyediakan narasi intervensi Allah dalam kisah perjuangan dan pembebasan bangsa Israel menuju tanah perjanjian (Gutiérrez 1988). Ini juga mencerminkan dimensi politis tindakan Allah. Dalam peristiwa eksodus, Allah menunjukkan belas rasa terhadap kaum tertindas. Eksodus membahasakan keterlibatan Allah dalam membebaskan orang Israel dari keterbelengguan dan penganiayaan bangsa Mesir. Allah sungguh terlibat bersama korban untuk melawan struktur sosial yang tidak adil demi mencapai kehidupan yang baru (Gutiérrez 1988).

Ketiga, penebusan Kristus sebagai tindakan pemenuhan yang sempurna. Karya penebusan Yesus Kristus merupakan bentuk penyempurnaan keselamatan Allah. Dalam karya penebusannya, Yesus mengupayakan karya keselamatan yang sempurna. Karya itu dilakukan agar manusia memperoleh makna dan kepenuhan yang baru. Mereka hidup sebagai ciptaan baru yang hidup dalam karya keselamatan Yesus. Tidak hanya itu. Karya penebusan Kristus yang Agung juga menunjukkan suatu tindakan pembebasan manusia dari dosa dan semua konsekuensinya, yakni perampasan, kebencian, dan ketidakadilan. Yesus membawa harapan baru agar manusia hidup dalam keadaan yang aman dan damai (Gutiérrez 1988).

Dalam karya ini, umat manusia merupakan kiblat misi Yesus. Ia datang untuk membebaskan manusia. Walaupun demikian, Ia juga turut memanggil manusia untuk terus menjadi ko-kreator Allah. Ia mengundang manusia untuk tetap

berpartisipasi dan mengambil bagian dalam tindakan konkret dengan mengupayakan pembebasan. Iman mesti membawa konsekuensi publik dengan bersolider dan berpartisipasi dalam mengupayakan pembangunan masyarakat yang adil.

Berhadapan dengan realitas politik patronase, upaya penyelamatan (pembebasan) melalui pendidikan politik menyasar pada beberapa level. *Pertama*, pembebasan dari sistem sosial. Disadari bahwa politik patronase di Manggarai terjadi lantaran hegemoni sistem sosial yang tidak adil. Masyarakat tersebut masih dibelenggu kultur primordialis. Mereka cenderung menjatuhkan pilihan pada calon yang telah menyampaikan janji tentu. Tatkala terpilih calon tersebut kerap menghadiahkan materi atau janji tertentu (Aspinall and Sukmajati 2015). Karena itu, dalam spirit teologi publik, pendidikan politik yang dicanangkan Gereja Keuskupan Ruteng menghendaki agar umat Katolik bebas dari kultur primordialis. Pendidikan politik bertujuan untuk mengkritik dan membebaskan manusia dari struktur sosial yang kejam. Kritik dan upaya transformatif harus bisa membawa manusia pada suatu keadaan sosial yang adil dan manusiawi (Gutiérrez 1983).

Hal ini pun secara tegas dikemukakan Uskup Ruteng. Ia menghimbau agar tidak memilih calon hanya karena bayaran tertentu atau tergiur oleh janji politis yang mendatangkan keuntungan material. Uskup Sipri juga mengajak agar memilih pemimpin yang memiliki pikiran, perasaan, dan hati untuk rakyat. Temukan pemimpin yang berkomitmen mengikuti gaya kepemimpinan Yesus yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani (Mrk 10:45) (VoxNtt.com 2020).

Kedua, pembebasan personal. Pembebasan Kristiani tidak hanya menyasar pada kritik ideologis. Namun, hal itu juga didukung dengan pembebasan personal. Setiap orang dituntut untuk bertanggung jawab dengan mereorientasi sejarah kehidupannya. Di tengah situasi keterbelengguan, setiap orang harus mengarahkan dan membebaskan dirinya dari perhambaan dan perbudakaan. Ia mesti memposisikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dengan melepaskan diri tekanan, ketergantungan, ataupun ikatan dari luar. Selain itu, kebebasan sejati ini harus mampu dielaborasi pada kesanggupan untuk terlibat dalam usaha mencapai kebebasan dan kemerdekaan kolektif. Setiap orang diarahkan untuk terlibat secara konkret dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bersama (Gutiérrez 1983).

Pendidikan politik yang dicanangkan Keuskupan Ruteng merupakan upaya konkret untuk membebaskan umat Allah dari perhambaan dan perbudakaan. Upaya demikian bertujuan agar mereka menjauh dari hasrat akan kekuasaan dan glorifikasi kepentingan. Melalui strategi tersebut, gereja mengupayakan agar umat Allah sanggup hidup kebenaran Kristiani dan sanggup memelihara hati nurani sebagai penunjuk kebenaran (Dokumentasi dan Penerangan KWI 2013).

Ketiga, pembebasan yang sempurna dalam Kristus. Gereja menyadari bahwa corak pembebasan yang sempurna terungkap dalam diri Yesus Kristus. Melalui karya penebusan-Nya, manusia terlahir kembali sebagai insan baru. Dalam keadaan ini, perhambaan pada dunia dihapuskan, dosa personal dan sosial ditanggalkan. Sebab dalam Kristus, manusia memperbaharui dirinya dengan baik, sehingga dengan itu, ia pun dapat menjalin relasi dan persatuan dengan Allah. Dalam persatuan-Nya dengan Allah, setiap orang untuk bersatu dengan sesama.

Kehadirannya untuk yang lain merupakan perwujudan cinta dan relasi dengan Tuhan (Chen 2002).

Pendidikan politik yang dicanangkan Gereja Keuskupan Ruteng merupakan upaya kolektif guna mengantar setiap orang pada persatuan yang intim dengan Kristus. Melalui upaya demikian, gereja mengantar umat Allah agar hidup dalam kebenaran Kristiani dan menjadi tanda kasih Ilahi dalam kehidupan bersama. Sebagaimana Paus Fransiskus, ini merupakan terobosan bersama agar umatNya mampu membawa sukacita injil bagi dunia (Paus Fransiskus 2015).

Pendidikan Politik dan Iman yang Membumi

Jika ditelisik dari perspektif teologi publik, pendidikan politik yang dicanangkan Gereja Keuskupan Ruteng merupakan bentuk konkret dari sikap tanggap atas kenyataan sosial. Melalui upaya demikian, gereja berupaya menerjemahkan iman dalam kenyataan konkret. Demi merealisasikan kebenaran iman dalam kehidupan nyata, gereja merasa terpanggil untuk menyikapi persoalan publik seperti ini (Erp 2024). Dengan hadir secara konkret, gereja terlibat dalam mengadabkan demokrasi. Melalui upaya pendidikan politik seperti ini, gereja berkontribusi dalam meradikalisasi demokrasi.

Gereja Keuskupan Ruteng meyakini bahwa relasi spiritual dengan Allah tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk doa dan praktik rohani, tetapi harus menjelma dalam keberani untuk terlibat secara aktif dalam persoalan sosial-politik, termasuk mengkritisi praktik politik patronase. Keterlibatan semacam ini merupakan ekspresi iman yang utuh, karena iman Kristen bukan hanya bersifat

mistik melainkan juga memiliki dimensi moral dan sosial. Oleh karena itu, komitmen terhadap keadilan sosial menjadi bagian integral dari kesaksian iman gereja dalam kehidupan publik (Panita Sinode III Keuskupan Ruteng 2017). Karena itu, dalam semangat teologi publik, Gereja Keuskupan Ruteng justru menunjukkan cara beriman yang solider (Chen 2012). Ia mengarahkan pikiran dan tanggung jawabnya untuk terlibat (Boff 2008). Ia hadir untuk berbela rasa, ‘menggumuli’ penderitaan, dan mengambil bagian dalam tindakan konkret (Sunarko 2022).

Hal ini pun sejalan dengan semangat *Gaudium et Spes* artikel 3, yang menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk bekerja sama secara tulus dalam membangun persaudaraan universal. Gereja tidak digerakan oleh ambisi duniawi, tetapi menjalankan misi Kristus di dunia dengan bimbingan Roh Kudus:ewartakan kebenaran, membawa keselamatan, melayani umat manusia, dan bukan untuk mencari kekuasaan atau menghakimi (Dokumentasi dan Penerangan KWI 2013).

KESIMPULAN

Gereja Keuskupan Ruteng telah secara aktif menunjukkan perannya di ruang publik dengan menanggapi maraknya politik patronase di wilayah Manggarai melalui strategi pastoral yang bersifat edukatif-moral. Keterlibatan ini diwujudkan dalam tiga pilar utama: animasi publik untuk menumbuhkan budaya jujur dan malu melakukan korupsi, radikalisasi sikap etis melalui pewartaan dan kampanye anti-politik uang, serta desakan kepada institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan bermartabat. Dalam kerangka

teologi publik, langkah-langkah ini merupakan wujud konkret dari iman yang tidak tinggal diam di ruang privat, melainkan diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk mengkritik dan memperbaiki tatanan sosial yang mencederai kebaikan bersama.

Meskipun kontribusi moral dan pendidikan ini sangat penting, artikel ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang diambil Gereja Keuskupan Ruteng belum secara efektif menyentuh akar persoalan yang bersifat struktural. Strategi yang cenderung normatif ini dinilai belum cukup untuk membongkar jejaring kekuasaan, ekonomi, dan budaya yang melanggengkan politik patronase. Oleh karena itu, direkomendasikan agar gereja memperdalam keterlibatannya dengan memadukan pendekatan spiritual-moral yang sudah berjalan dengan strategi advokasi struktural yang lebih terarah dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, partisipasi gereja di ruang publik dapat menjadi lebih utuh dan transformatif, tidak hanya sebagai pewarta iman, tetapi juga sebagai motor perubahan sosial demi terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2017. "Dari Praktik Politik Ke Nalar Politik." In *Politik Ambivalensi Nalar Elite Di Balik Pemenangan Pilkada*, edited by Guno Tri Jhajoko, XV. Yogyakarta: PolGov.
- Ardin, Ambrosius. 2024. "Kerawanan TPS Di Manggarai Timur: Politik Uang Hingga Kekerasan." Detik.Com. 2024.
- Aspinall, Edward, and Mada Sukmajati. 2015. "Patronase Dan Politik Klientisme Di Indonesia." In *Politik Uang Di Indonesia: Patronase Dan Klientisme Pada Pemilu Legislatif 2014*, edited by Edward Aspinall and Mada Sukmajati, 1. Yogyakarta: PolGov.
- Boff, Leonardo. 2008. *Essential Care: An Ethics of Human Nature*. Cetakan I. Texas: Baylor University Press.
- Bromell, David. 2011. "What Is Public Theology." Dunedin.
- Chandra, Herwindo. 2021. "Teologi Publik Dialog Antaragama Di Indonesia." In *Teologi Publik: Sayap Metodologi & Praksis*, edited by CM F.X.E.Armada

- Riyanto, Cetakan I, 147. Yogyakarta: Kanisius.
- Chen, Martin. 2002. *Teologi Gustavo Gutierrez*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 2012. “Tahun Rahmat Tuhan Telah Datang (Lukas 4:19): Refleksi Praksis Pastoral 100 Tahun Gereja Katolik Manggarai.” In *Iman, Budaya, & Pergumulan Sosial*, edited by Martin Chen and Charles Suwendi, 34–35. Jakarta: Obor.
- Chung, Paul S. 2010. *Public Theology in an Age of World Christianity*. Cetakan I. New York: Palgrave Macmillan.
- Dokumentasi dan Penerangan KWI. 2013. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Cetakan XX. Yogyakarta: Kanisius.
- Erp, Stephan van. 2024. “Living with the Hidden Fod: The Sacramentality of Public Life.” Maumere.
- Fuka, Nofri. 2024. “Keuskupan Ruteng Gelar Misa Pemilukada Damai, Bersaudara, Dan Bermartabat.” *Tribunnews.Com*. 2024.
- Gutierrez, Gustavo. 1983. *The Power of the Poor in History*. London: SCM Press.
- . 1988. *A Theology of Liberation*. New York: Orbis Books.
- Handoyo, Eko, and Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hormat, Siprianus Mgr. 2024a. “Surat Gembala Menyongsong Pemilu 2024.” Ruteng.
- . 2024b. “Surat Gembala Uskup Ruteng Menyongsong Pemilu 14 Februari 2024.” Ruteng.
- Juhani, Sefrianus. 2021. “Teologi Publik Konteks Gereja Katolik Manggarai.” In *Teologi Publik: Sayap Metodologi Dan Praksis*, edited by CM F.X.E. Armada Riyanto, Cetakan I, 223. Yogyakarta: Kanisius.
- Komisi Keadilan dan Perdamaian. 2009. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Ledalero.
- Kurniawan, Pepy. 2019. “Berkas Dugaan Politik Uang Di Matim Diserahkan Ke Kejaksaan.” *Voxntt*. 2019.
- Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan. 2019. “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1: 29–41.
- Manasye, Yohanes. 2019. “Bawaslu Manggarai Limpahkan Berkas Kasus Politik Uang Ke Polisi.” *Media Indonesia*. 2019.
- McLaren, Peter dan Petar Jandric. 2018. “Paulo Freire and Liberation Theology : The Christian Consciousness of Critical Pedagogy” 94: 246–64. <https://doi.org/10.30965/25890581-09402006>.
- Nastution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrullo. 2019. “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa” 6, no. 1: 141–52.
- Panita Sinode III Keuskupan Ruteng. 2017. *Dokumen Sinode III 2013-2015 Keuskupan Ruteng*. Yogyakarta: asdaMedia.
- Paus Fransiskus. 2015. “Seri-Dokumen-Gerejawi-No-98-LAUDATO-SI-1.”

Ensiklik Paus Fransiskus, 1–161.

Peters, Ted. 2018. "Public Theology: Its Pastoral, Apologetic, Scientific, Political, and Prophetic Tasks." *International Journal of Public Theology* 12, no. 2: 155.

Riyanto, F.X.E.Armada. 2021. "Makna Hidup Publik Yesus Kristus: Skema Bukit Dan Kalvari." In *Teologi Publik: Sayap Metodologi & Praksis*, edited by CM F.X.E. Armada Riyanto, Cetakan Pe, 3. Yogyakarta: Kanisius.

Schultenordholt, Henk, and Gerry Van Klinken. 2007. "Introduction." In *Renegotiating Boundaries Local Politic in Post-Suharto Indonesia*, edited by Henk Schultenordholt and Gerry Van Klinken, 1. Netherlands: KITLV.

Suhardi, Endik. 2020. "Gereja Keuskupan Ruteng Dukung Pilkada Damai Di Kabupaten Manggarai Barat." *Sesawi Net*. 2020.

Sunarko, Adrianus. 2022. *Teologi Kontekstual Modern*. Cetakan I. Jakarta: Obor.

Tracy, David. 1981. *The Analogical Imagination*. New York: Crossroad Publishing Company.

VoxNtt.com. 2020. *Uskup Ruteng Ajak Umat Berani Menolak Politik Primordial Dan SARA*.

Wilfried, Felix. 2017. *Asian Public Theology*. New Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge.